

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**( LKIP )**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**( BPBD )**



**KABUPATEN LUWU  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

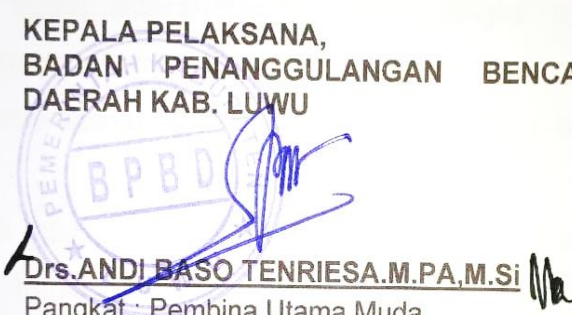
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT ,yang telah memberikan Rahmat dan Karunianya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan.

Salah Satu kebijakan dalam mewujudkan Good Governance adalah terbitnya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) yang mana mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk melaporkan Kinerja kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban untuk memintah pertanggung jawaban dimana laporan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) dengan mengacu pada pedoman penyusunan Lakjip.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi pertimbangan dalam menyusun dan pelaksanaan program selanjutnya, Aamiin.

Belopa, 04 Februari 2025

KEPALA PELAKSANA,  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KAB. LUWU



Drs. ANDI BASO TENRIESA.M.PA,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19661231 199203 1 091

## DAFTAR ISI

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                     | i   |
| DAFTAR ISI .....                         | iii |
| BAB I .....                              | 1   |
| PENDAHULUAN .....                        | 1   |
| A. LATAR BELAKANG .....                  | 1   |
| B. Maksud dan tujuan .....               | 21  |
| BAB II.....                              | 22  |
| PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..... | 22  |
| A. Rencana Strategis .....               | 22  |
| BAB III.....                             | 30  |
| AKUNTABILITAS KINERJA 2024.....          | 30  |
| A. Evaluasi Kinerja .....                | 30  |
| B. Strategi Pemecahan Masalah .....      | 30  |
| BAB IV .....                             | 33  |
| P E N U T U P .....                      | 33  |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Sistem akuntabilitas yang baik perlu dimiliki oleh jajaran Aparatur Negara, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan "Good Governance" yang merupakan tuntutan terselenggaranya manajemen pemerintahan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme).

Tuntutan reformasi yang mengharuskan berubahnya paradigma dan perilaku pemerintah (aparatur Birokrasi) ke arah yang lebih baik, sehingga konsekuensi logis dalam pelaksanaan tugas adalah mengutamakan cara kerja profesional serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka organisasi pemerintah harus memiliki manajemen yang baik serta didukung sumber daya manusia / aparatur yang memiliki kemampuan, sehingga dapat memainkan peranan sebagai pemikir, perencana, pelaksana sekaligus pengawas jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

### **1. GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI**

#### **a. Kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dikuatkan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2010, Tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.

## **b. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

*Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu No. 123 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu.*

**Tugas Pokok :**

- 1) Menetapkan Pedoman dan Pengarahan terhadap Usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat , rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- 2) Menetapkan Standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan Perundang – Undangan
- 3) Menyusun, Menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan Bencana
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap Bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran Uang dan Barang;
- 7) Mempertanggung Jawabkan Penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ;
- 8) Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan .

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya Badan Penanggulangan Bencana daerah mempunyai Fungsi:

- 1) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat ,Efektif dan Efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana Secara terencana,terpadu dan menyeluruh;

Berkenaan dengan tugas dan Fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu memiliki tugas peran serta dalam Manajemen Penanggulangan Bencana di Kabupaten Luwu.

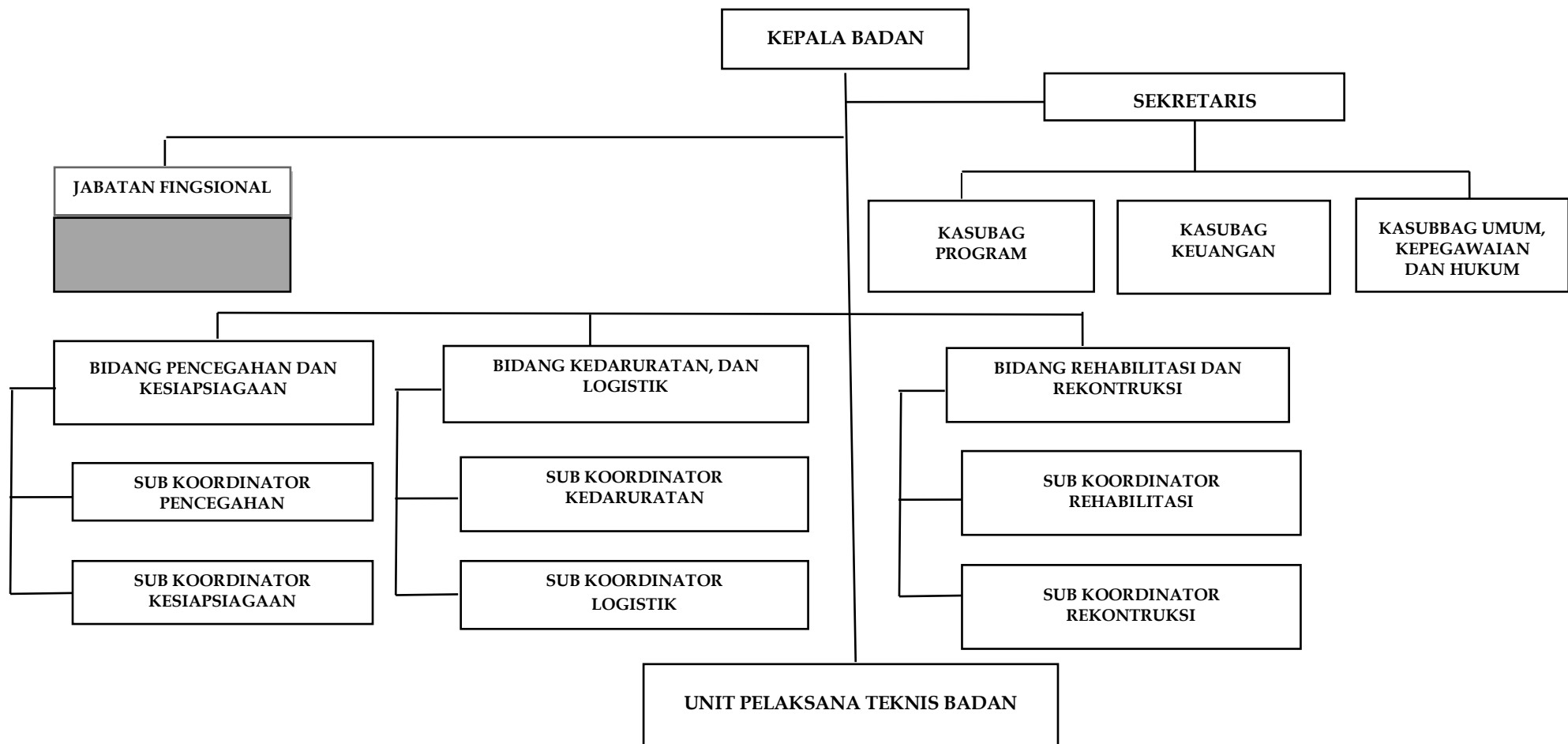
## **2. STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **DAERAH KABUPATEN LUWU**

- ❖ Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- ❖ Sekretariat
  - Sub Bagian Umum , Kepegawaian dan Hukum
  - Sub Bagian Program
  - Sub Bagian Keuangan
- ❖ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :
  - Sub Koordinator Pencegahan
  - Sub Koordinator Kesiapsiagaan
- ❖ Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas :
  - Sub Koordinator Kedaruratan
  - Sub Koordinator Logistik
- ❖ Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :
  - Sub Koordinator Rehabilitasi
  - Sub Koordinator Rekonstruksi

LAMPIRAN     PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR   : 28 TAHUN 2010  
TANGGAL :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN LUWU**



**B. Maksud dan tujuan**

Maksud dari *Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini adalah untuk* mengevaluasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu tahun 2024, sekaligus sebagai Pertanggung Jawaban Kegiatan di tahun 2024.

*Tujuan adalah* untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan seluruh Program Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu tahun 2024 yang ditetapkan dan memberikan arah dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu merupakan langkah awal untuk melaksanakan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu. Perencanaan Strategis dalam System akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah merupakan sebuah proses sistematis yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurung waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Sejumlah langkah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang termasuk didalamnya pemberian tanggung jawab haruslah dibangun dalam suatu bingkai komitmen organisasi. Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu empat tahun dan diimplementasikan kedalam rencana kerja (Renja) Tahunan. Adapun Visi Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

#### **II.2. Visi dan Misi**

##### **II.2.1 *Pernyataan Visi***

Berdasarkan hasil pembahasan dan musyawarah seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana daerah dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2010, maka disepakati untuk menetapkan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu dalam penyelenggaran Otonomi Daerah, dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( Good Governance & Clean Governance ) yaitu;

**” Meningkatkan Kebersamaan yang bersinergi antara Pemerintah dan Masyarakat menuju Masyarakat Tangguh Terhadap Bencana”.**

- ***Penjelasan Makna***

Didalam Visi tersebut terkandung keinginan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu sebagai instansi yang bersifat koordinatif, komando dan pelaksanaan yang menangani penanggulangan bencana di Kab. Luwu untuk mewujudkan rasa aman dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana yang mampu menjadi faktor pendorong dan menarik (pull dan push factor) dalam mendukung pembangunan dan pergerakan perekonomian Kab. Luwu dimasa mendatang, dengan mengembangkan konsep, regulasi dan standar operasional prosedur (SOP), protap, penanggulangan bencana mulai dari tahapan pencegahan sampai pada tahap pemulihan keadaan bencana, proses

tanggap darurat sampai pada tahapan pemulihan keadaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi infra struktur yang mengalami kerusakan.

## **II.2.2 Pernyataan Misi**

- Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.
- Membangun sistem penanggulangan Bencana yang handal.
- Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan terpadu.
- Mengembangkan sistem informasi penanggulangan bencana.

## **II.3 Tujuan dan Sasaran**

### **II.3.1 Tujuan**

- a. Memadukan upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan daerah kabupaten luwu
- b. Melindungi masyarakat dari ancaman bencana dan dampak bencana melalui usaha pemberian informasi dan pengetahuan, pendidikan, pelatihan, sosialisasi peningkatan keterampilan dan lain - lain.
- c. Melaksanakan tanggap darurat kaji cepat, menentukan tingkat bencana, penyelamatan dan evakuasi korban, penanganan kelompok rentang dan menjamin pemenuhan kebutuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.
- d. Memulihkan dan meningkatkan secara baik kehidupan sosial ekonomi , budaya dan lingkungan serta keamanan dan ketertiban masyarakat serta perbaikan infrastruktur/ fasilitas umum, sosial yang rusak akibat bencana.

### **I.3.2 Sasaran**

Terlaksananya Peningkatan Sinergisitas Pemerintah ,masyarakat dan dunia usaha

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di kab.Luwu

- a. Menyediakan sarana dan prasarana aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang memadai didalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar dapat berlangsung dengan baik dan maksimal.
- b. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan staf BPBD Luwu ,stak holder terkait dan masyarakat didalam upaya penanggulangan bencana.
- c. Menyusun program dan kegiatan kedaruratan dan logistik bencana dan mengoptimalkan kinerja satuan Tim Reaksi Cepat(TRC) dalam upaya kaji cepat penanggulangan bencana.
- d. Menyusun Program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

- e. Menyusun program kerja peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan Bencana.
- f. Menyusun program kerja dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- g. Meningkatkan kualitas kelembagaan ,ketatalaksanaan , dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penerapan prinsip good governance.

## **II.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

### **II.4.1 Kebijakan Organisasi**

- a. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.
- b. Mengoptimalkan bimbingan ,pendidikan dan pelatihan , pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana , secara profesional terhadap berbagai program / kegiatan penanggulangan bencana ;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui program Reaksi Cepat pemantauan /pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya penanggulangan.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha ,dalam upaya penanggulangan bencana.

### **II.4.2 Program Utama dan kegiatan pokok**

#### **a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota**

##### **➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
- Koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKP
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### **➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/semesteran SKPD

##### **➤ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Cetak dan Peraturan Perundang-Undangan
    - Penyediaan Bahan/ Material
    - Fasilitas Kunjungan Tamu
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
  - **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
    - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- b. Program Penanggulangan Bencana**
- **Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten**
    - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)
  - **Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
    - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/ Kota
    - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
  - **Kegiatan Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
    - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota
    - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota
  - **Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**
    - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota

**PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT  
ORGANISASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Drs. ANDI BASO TENRIESA.M.PA, M.Si**

**Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Luwu**

**Pihak Pertama** pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Belopa, 04 Februari 2025

**Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Luwu**

**Drs. ANDI BASO TENRIESA, M.PA, M.Si  
PKT: Pembina Utama Muda  
NIP : 19661231 199203 1 091**

FORMULIR PENETAPAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : BADAN PENANGULANGAN BENCANA

DAERAH KAB. LUWU

Tahun Anggaran : 2024

| Sasaran Strategis                                           | Indikator Kinerja                                                               | Target  | Program/kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                | Anggaran      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |                                                                                 |         |                                                                                               |               |
|                                                             | Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah           | 100%    | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | 20.989.167    |
|                                                             | Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Serta Perubahan Renstra dan Renja yang disusun | Dok     | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                | 16.731.231    |
|                                                             | Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun                                            | Dok     | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                     | 385.248       |
|                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun                                  | Dok     | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                           | 0             |
|                                                             | Jumlah Dokumen DPA-SKPD                                                         | Dok     | Sub Kegiatan :Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                              | 368.677       |
|                                                             | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                               | Dok     | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                   | 2.963.000     |
|                                                             | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelakasanaan Program/Kegiatan yang disusun              | Dok     | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                              | 551.011       |
|                                                             | Cakupan Ketersediaan Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah           |         | Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                             | 2.472.778.093 |
|                                                             | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan                  | Tahun   | Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                              | 2.378.926.294 |
|                                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD            |         | Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifkasi Keuangan SKPD                | 85.200.000    |
|                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun                                | Laporan | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                    | 4.045.618     |
|                                                             | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun                         | Laporan | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD | 4.606.181     |
|                                                             | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD                                      |         | Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                             | 7.000.000     |
|                                                             | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |         | Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                    | 7.000.000     |
|                                                             | Presentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran                                   |         | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                 | 343.028.305   |
|                                                             | Jumlah Jenis cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | Bulan   | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                      | 7.564.600     |
|                                                             | Jumlah jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan      | Bulan   | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                       | 5.600.000     |

| Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja                                                                   | Target     | Program/kegiatan/ Sub Kegiatan                                                                                                  | Anggaran           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                       | Jumlah Jenis ATK yang disediakan                                                    |            | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material                                                                                        | 26.846.905         |
|                                       | Jumlah Jenis Jamuan Makan dan Minum yang disediakan                                 | Jenis      | Sub Kegiatan : Fasilitas Kunjungan Tamu                                                                                         | 10.368.000         |
|                                       | Jumlah Perjalanan dinas dalam dan luar daerah                                       |            | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                             | 292.648.800        |
|                                       | <b>Cakupan Ketersedian Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah</b>         |            | <b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                          | <b>226.726.339</b> |
|                                       | Jumlah surat masuk dan keluar yang diregistrasi                                     | Surat      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                   | 72.700.000         |
|                                       | Jumlah jasa administrasi keuangan                                                   | Ob         | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                            | 79.200.000         |
|                                       | Jumlah Bulan Peneyediaan Biaya Tagihan Telpon, Air dan Listrik                      | Bulan      | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                          | 74.826.339         |
|                                       | Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara                                          |            | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                | <b>136.386.540</b> |
|                                       | Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan | Unit       | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136.386.540        |
| <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b> |                                                                                     |            |                                                                                                                                 |                    |
|                                       | <b>Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten</b>          | <b>Dok</b> | Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                                     | <b>17.366.726</b>  |
|                                       | Jumlah Pesrta Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)                  | Orang      | Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)            | 17.366.726         |
|                                       | <b>Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>                               | <b>Keg</b> | Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                              | <b>354.176.742</b> |
|                                       | Jumlah Petugas dan Sarana Prasaranan Kesiapsiagaan terhadap Bencana yang disediakan | Orang      | Sub Kegiatan : Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota               | 343.484.242        |
|                                       | Jumlah dokumen rencana kontijensi yang di legalisasi                                | dokumen    | Sub kegiatan : Penyusunan rencana kontijensi                                                                                    | 2.337.500          |
|                                       | Jumlah aparatur dan warga negara yang mengikuti Gladi kesiapsiagaan                 | orang      | Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana                                                                                            | 8.355.000          |
|                                       | <b>Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>                               | <b>Keg</b> | Kegiatan : Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                               | <b>5.545.000</b>   |
|                                       | Jumlah Kejadian bencana yang dilakukan respon cepat darurat bencana                 | Kali       | Sub Kegiatan : Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota                                                                     | 1.700.000          |
|                                       | Jumlah kejadian Bencana yang ditangani                                              | Kali       | Sub Kegiatan : Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                | 3.845.000          |
|                                       | <b>Cakupan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</b>                               | <b>Keg</b> | Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                                                         | <b>8.567.450</b>   |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja                                                  | Target | Program/kegiatan/ Sub Kegiatan                                                 | Anggaran  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                   | Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan Bencana Daerah              | Dok    | Sub Kegiatan : Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/Kota                    | 3.369.917 |
|                   | Jumlah laporan hasil Binwas penyelenggaraan Penanggulangan Bencana |        | Sub kegiatan : pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana | 5.197.533 |

**Jumlah Anggaran : Rp. 3.592.564.362,-**

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp. 20.989.167,-
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 2.472.778.093,-
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp. 7.000.000,-
- Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Rp. 343.028.305,-
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 226.726.339,-
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 136.386.540,-
- Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Rp.17.366.918,-
- Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp. 354.176.742,-
- Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan evaluasi Korban Bencana Rp. 5.545.000,-
- Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Rp. 8.567.450,-

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA 2024**

**A. Evaluasi Kinerja**

Secara Umum Badan Penanggulangan Bencana Kab.Luwu telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang diembannya, hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya.

| No. | S a s a r a n                                                                   | Tercapai | Tidak<br>Tercapai |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1   | Terciptanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | √        |                   |
| 2   | Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                             | √        |                   |
| 3   | Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah                  | √        |                   |
| 4   | Terciptanya Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | √        |                   |
| 5   | Terpenenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | √        |                   |
| 6   | Terciptanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | √        |                   |
| 7   | Teciptanya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten                          | √        |                   |
| 8   | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                         | √        |                   |
| 9   | Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                          | √        |                   |
| 10  | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                    | √        |                   |

**Indikator Kinerja**

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja Input,Ouput dan Outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan walaupun untuk indikator kinerja outcom belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya

**B. Strategi Pemecahan Masalah**

Adapun strategis yang perlu dilaksanakan untuk memperlancar serta meningkatkan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Luwu, adalah:

1. Program pelatihan dan pendidikan untuk petugas dan relawan serta penguatan sistem koordinasi antar instansi dan lembaga terkait.
2. Aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti PUSDALOPS tahun 2020 sudah dibentuk namun sarana dan prasarana penunjang belum tersedia.
3. Penunjang Kelembagaan seperti TRC sudah ada tetapi masih ada kendala berupa keterbatasan Peralatan dan SDM Personil TRC yang masih minim.
4. Sejak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Luwu dibentuk, sering diusulkan untuk menambah personil khususnya yg memiliki kemampuan atau latar belakang pendidikan Teknis agar kedepan SDM yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Lebih berpotensi, namun sampai saat ini belum terwujud .

**Akuntabilitas Keuangan**

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai Berikut :

| NO | KEGIATAN                                                              | ANGGARAN      | REALISASI     | %      |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 1  | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Derah                      | 20.989.167    | 13.991.167    | 66.66% |
| 2  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | 2.472.778.093 | 2.310.215.283 | 93.43% |
| 3  | Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah                | 7.000.000     | 5.000.000     | 71.43% |
| 4  | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 343.028.305   | 311.320.443   | 90.76% |
| 5  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 226.726.339   | 206.058.152   | 90.88% |
| 6  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 136.386.540   | 102.399.565   | 75.08% |
| 7  | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                      | 17.366.726    | 16.116.726    | 92.80% |
| 8  | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadapt bencana              | 354.176.742   | 343.091.592   | 96.87% |
| 9  | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana                    | 5.545.000     | 3.450.000     | 62.22% |
| 10 | Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana                          | 8.567.450     | 5.197.533     | 60.67% |

**III.3.1 Belanja Rutin**

Dalam Meningkatkan kinerja Bidang BPBD Kabupaten Luwu untuk Tahun 2024 telah dialokasikan dana sebanyak :**Rp. 3.592.564.362,-**  
Terdiri dari :

#### **A. Belanja Operasi**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Belanja Pegawai         | Rp. 2.471.126.294,- |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.121.438.068,- |

#### **Realisasi Anggaran tahun 2023**

#### **B. Belanja Operasi**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Belanja Pegawai         | Rp. 2.308.983.484,- |
| Belanja Barang dan Jasa | Rp. 1.007.856.977,- |

***J U M L A H                      Rp. 3.316.840.461,- atau sebesar 92.33%***

Yang dimaksudkan untuk membiayai program - program kegiatan operasional maupun untuk Biaya Penanganan Tanggap Darurat Bencana,dan Pasca Bencana.Setelah di Ihktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu yang terdiri dari beberapa Program Kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang tidak sempat dilaksanakan, maka telah diprediksi Capaian Keuangan, 92.33% yaitu yang digunakan dalam Rangka Penyerapan beberapa Program Kegiatan yang telah mencapai 100% Pelaksanaannya.

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

Sepanjang Tahun 2024 ini beberapa keberhasilan telah dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu. Beberapa Keberhasilan yang dapat dicatat antara lain adalah semakin meningkatnya capaian target kinerja dari rencana strategi yang ditetapkan . Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pelayanan adalah jumlah personil ASN dan SDM yang masih kurang, sedang untuk Tahun 2025 Badan penanggulangan Bencana Kab.Luwu merencanakan penambahan personil TRC Tenaga ASN hal ini dapat mengurangi beban belanja Operasional Badan Penanggulangan bencana yang mana pada tahun 2024 ini biaya jasa Upah kerja pada kantor BPBD menyerap anggaran sebesar Rp. 433.700.000,-hal ini disebabkan lebih banyak personil TRC dari tenaga Kontrak dibanding tenaga ASN yang ada pada kantor BPBD Kab.Luwu.

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu pada tahun mendatang, beberapa langkah strategi yang akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas SDM para penyelenggara penanggulangan bencana di daerah dan didukung sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai.
2. Mengoptimalkan bimbingan dan pelatihan ,pembinaan teknis kegiatan simulasi penanggulangan bencana,secara profesional terhadap berbagai program /kegiatan penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui program respon Cepat pemantauan/pengawasan terhadap kejadian bencana dan upaya penanggulangan Bencana.
4. Jumlah anggaran yang dapat menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kab.Luwu mulai dari Pra, saat dan pasca bencana.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Tahun 2024 , Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi petunjuk kepada kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aamin .

Belopa, 04 Februari 2025

**KEPALA PELAKSANA,  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KAB. LUWU**

  
**Drs. ANDI BASO TENRIESA.M.PA,M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19661231 199203 1 091

